

JALIN KOORDINASI DENGAN PENYELENGGARA PEMILU

Siagakan Personel, Sat Pol PP Siap Tertibkan APK Melanggar

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya menyiagakan personelnya untuk aksi penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024 yang melanggar ketentuan. Koordinasi dengan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kota Yogya juga sudah dijalin.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, menjelaskan pihaknya tinggal menunggu arahan dari KPU maupun Bawaslu untuk melakukan aksi penertiban APK Pilkada yang melanggar.

"Dalam rangka penertiban APK itu kami sudah menyiapkan aparat gabungan sebanyak kurang lebih seratus personel," jelasnya, Kamis (17/10).

Menurutnya, seratus aparat gabungan untuk penertiban APK itu terdiri dari Sat Pol PP di tingkat mako dan kemantren, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Polresta serta TNI.

Untuk personel KPU dan Bawaslu juga turun sesuai kewenangan masing-masing. Di samping personel, Sat Pol PP Kota Yogya juga sudah melakukan pertemuan dengan Bawaslu Kota Yogya terkait penegakan aturan APK dan mekanisme penertibannya.

Pilkada Kota Yogya, pihaknya mengacu Peraturan Walikota (Perwal) Yogya Nomor 75 Tahun 2023. Selain itu juga Perwal Nomor 65 Tahun 2024 terkait perubahan aturan sebelumnya.

Dodi menegaskan fasilitasi penertiban APK mengacu khususnya di pasal 10 Perwal 75/2023. Fasilitasi penertiban dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pada instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan bahan kampanye. Dukungan itu antara lain berupa sarana prasarana dan personel.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogya Jantan Putra Bangsa, mengatakan tidak semua kewenangan APK berada di Bawaslu. Alur penertiban jika terdapat unsur pelanggaran, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan ke pasangan calon dengan waktu tiga hari. Jika tidak ditindaklanjuti akan jadi temuan untuk direkomendasikan penertiban ke KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bawaslu Kota Yogya mencatat data jumlah pelanggaran APK yang direkomendasikan untuk ditertibkan

sekitar 518 yang tersebar di berbagai wilayah. "APK itu melanggar pasal larangan di Perwal 65/2024 dan Keputusan KPU Kota Yogya Nomor 201/2024. Sedangkan kami berikan rekomendasi ke PPK," katanya. **(Dhi)-f**

MUHAMMAD AFFAN Gemar Berorganisasi, Harapkan Pemerataan Pembangunan



YOGYA (KR) - Muhammad Affan menjadi salah satu wajah baru di DPRD Kota Yogyakarta 2024-2029. Kader Partai Golkar yang gemar berorganisasi di masyarakat ini mengharapkan adanya pemerataan pembangunan di Kota Yogya.

Bang Affan, sapaan akrabnya, menilai pembangunan yang merata menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan jalannya pemerintahan. Lembaga dewan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di samping eksekutif harus mampu menempatkan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. "Ini yang perlu kita kawal bersama supaya hasil dari pembangunan mampu dirasakan secara merata oleh masyarakat," ungkapnya.

Pengalamannya selama berorganisasi itu pula yang mendorongnya agar konsisten mengawal jalannya pembangunan. Hal ini tidak lepas dari aspirasi konstituenya hingga mampu meraih kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Apalagi pada periode sebelumnya, 2019-2024, Partai Golkar tidak memiliki wakil dewan dari daerah pemilihan (dapil) 2 yang terdiri dari Kemantren Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan dan Pakualaman. Oleh karena itu lolosnya pria 37 tahun ini pun mampu menjadikan Partai Golkar memiliki wakil yang merata

di tiap dapil dengan total lima kursi atau naik satu kursi dibanding periode sebelumnya.

Selain pemerataan pembangunan, Bang Affan juga menaruh perhatian terhadap penerangan di Kota Yogya. Luas wilayah yang hanya 32,8 kilometer persegi tentu bukan hal sulit untuk menjadikan setiap sudut kota dengan penerangan yang memadai. Wilayah dengan kualitas penerangan yang baik bisa meminimalisir potensi tindakan kriminalitas, termasuk aksi klithih atau kenakalan remaja.

"Tidak hanya pembangunan yang merata, penerangan juga harus merata di tiap wilayah supaya keindahan Kota Yogya bisa dinikmati hingga tiap sudut wilayahnya," tandas pria yang hobi bermain sepakbola ini.

Ketika pembangunan sudah merata maka dirinya akan lebih fokus dalam mendorong eksekutif dalam membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

Terutama bagi masyarakat Kota Yogya lantaran angka pengangguran pada usia produktif yang masih tinggi. Sehingga penduduk pada masa angkatan kerja mampu terserap seluruhnya serta turut memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Kota Yogya. Dengan begitu daya saing kota ini akan semakin meningkat dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan juga semakin aktif.

Oleh karena itu, pria yang tinggal di Jalan Brigjend Katamso No 222 ini akan tetap turun di masyarakat serta menjadi penyambung lidah agar mendapat perhatian pemerintah. **(Dhi)-f**

FKDM DIY Perkuat Deteksi Dini Cegah Peredaran Miras dan Obat Terlarang

YOGYA (KR) - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah Istimewa Yogyakarta terus menguatkan upaya deteksi dini masyarakat untuk mencegah peredaran minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang. Hal ini penting, lantaran kedua hal tersebut sudah meresahkan masyarakat dan sangat merusak masa depan generasi muda.

Ketua FKDM DIY, Drs Surjadiman MS MM mengatakan, akhir-akhir ini banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan maraknya peredaran miras terutama oplosan. Ketika miras yang dicampur obat-obatan terlarang dikonsumsi oleh seseorang, menyebabkan pelaku menjadi beringas (lebih berani dan nekat) untuk melakukan kejahatan, seperti melakukan pemukulan, tindak kekerasan dan lainnya.

"Miras oplosan ini karena harganya tidak mahal menjadikan banyak yang mengonsumsi, termasuk kalangan masyarakat ekonomi tidak mampu. Kalau tidak dicegah peredarannya akan sangat merusak generasi muda kita, dan mengancam masa depan bangsa dan negara," terang Surjadiman kepada KR di sela Raker FKDM DIY bertema 'Pencegahan dan Penindakan Peredaran Miras dan Obat-obatan Terlarang di DIY' di Kantor Badan Kesbangpol DIY, Selasa (15/10).

Raker tersebut diikuti anggota FKDM DIY, perwakilan FKDM kabupaten/kota se DIY dan organisasi pemuda. Raker menghadirkan sejumlah pembicara yaitu,

AKBP M Mardiyono SE (Polda DIY), Adi Susetyo Kurnianto SSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPSTP Kabupaten Sleman) dan R Chaniago Iseda (FKDM DIY).

Kabid Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Badan Kesbangpol DIY Djuli Sugiarto SSos MP mengatakan, dari informasi yang diterima sepanjang Juli-September 2024, masalah peredaran miras memang sudah sangat mengkhawatirkan. Itu terbukti dengan meningkatnya kejadian kriminalitas di DIY.

"Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menekan peredaran miras dan obat-obatan terlarang di DIY. Mari bersama kita jaga Yogyakarta yang aman dan nyaman sebagai kota wisata, pendidikan dan kebudayaan," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Surjadiman, salah satu upaya untuk mencegah generasi muda mengonsumsi miras dan obat-obatan terlarang adalah melalui edukasi. Di sinilah pentingnya peran guru di sekolah untuk menjelaskan tentang bahaya mengonsumsi miras dan obat-obatan terlarang, di samping melalui penanaman nilai-nilai agama.

"Informasi (edukasi) itu harus terus diberikan agar terpatni dalam benak generasi muda, sehingga akan menghindari miras dan obat terlarang. Tak kalah penting peran masyarakat dalam deteksi di lingkungan masing-masing mencegah peredaran miras dan obat terlarang," ujarnya. **(Dev)-f**

DIRUT BRI SUNARSO UNGKAP KETAHANAN PANGAN jadi Kunci Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap



Direktur Utama Sunarso saat menjadi pembicara dalam Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9/2024).

JAKARTA (KR) – Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

"Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi," kata Sunarso dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9). Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US\$ 4.465 (sumber: World Bank).

Terkait hal tersebut, Sunarso

mengungkapkan dalam kajian BRI faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. "Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan," ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka

pekerjaan.

"Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting," kata Sunarso. Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan," ujar Sunarso. (*)



Kajian BRI mengungkap faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.



Ilustrasi lahan pertanian yang luas sebagai modal awal untuk program ketahanan pangan nasional.

LELANG EKSEKUSI PAJAK PUSAT PENGUMUMAN LELANG KEDUA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan menyelenggarakan penjualan dimuka umum atau lelang barang sitaan pajak, yaitu :

No.	Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1.	Sebidang tanah pekarangan seluas 701m2, berlokasi di Selomartani, Kalasan Kab. Sleman, SHM 512/Selomartani a.n Oki Widayanto.	Rp 496.308.000,-	Rp 99.261.600,-

yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal : Jumat / 01 November 2024.
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet).
Cara Penawaran : Open Bidding di portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

Adapun Persyaratan Lelang sebagai berikut :

- Calon Peserta lelang mendaftarkan diri melalui alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dan lelang akan dilaksanakan secara terbuka.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan ke rekening VA (Virtual Account) selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit.
- Pemenang lelang Wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang dan bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
- Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi jika lelang dibatalkan karena tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi mengenai pengumuman lelang dapat diakses melalui portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id atau menghubungi Jurusita (Ali Imron 082326044600) dan/ atau Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (Dwi Meisandra 082241980539) dan/atau KPP Pratama Sleman telp (0274) 4333940 atau KPKNL Yogyakarta (0274) 544091.

Sleman, 18 Oktober 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman
TTD
Moch. Luqman Hakim